



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M ZAINUDDIN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 432376

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 18.080.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/112 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000
3. Tanah Seluas 389 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
4. Tanah Seluas 213 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
5. Tanah Seluas 8820 m2 di KAB / KOTA BOJONEGORO, WARISAN Rp. 370.000.000
6. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA GRESIK, WARISAN Rp. 12.150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 214.000.000**

1. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ JAZZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SOUL 2015 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SOUL Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	80.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	18.374.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	18.374.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.